

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PROGRAM USAHA KECIL MENENGAH (UKM)
DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN MODAL USAHA UKM DI
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI DI
KABUPATEN SINGKIL**

OLEH:

RUDI SURIYATMIKO

NPM: 1403100015

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Konsentrasi Administrasi Pembangunan



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh :

Nama lengkap **RUDI SURIYATMIKO**
N M P **1403100015**
Program Studi **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**
Judul Skripsi **EFEKTIVITAS PROGRAM USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN MODAL USAHA UKM DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL**

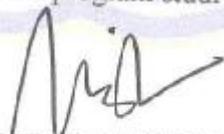
Medan, 17 oktober 2018

Pembimbing I



Dr. MOH. YUSRI ISFA., M.SI

Disetujui oleh
Ketua program studi



NALIL KHATRIAH, S.IP, M.PD

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos. MSP

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama lengkap : RUDI SURİYATMIKO
N M P : 1403100015
Program Studi : ILMU ADMINITRASI NEGARA
Pada hari,tanggal : Medan ,17 Oktober 2018
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : DEDI AMRIZAL,S.Sos.,M.Si (.....)

PENGUJI II : NALIL KHAIRIAH,S.IP,M.Pd (.....)

PENGUJI III : Dr, MOHD. YUSRI ISFA.,M.SI (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua


Dr. ARIFIN SALEH ,S.Sos.,MSP



Sekretaris


Drs. ZULBAHMI,M.LKom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya RUDI SURİYATMIKO, NPM 1403100015, menyatakan
sesungguh-sungguhnya:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk apapun yang dilarang oleh undang-undang, termasuk perbuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau menjiplak karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa didalam skripsi ini adalah karya dan tulisan sendiri, bukan karya orang lain atau kerja plagiat, jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak dapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan disepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu, dalam naskah ini dan disebutkan di daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya batalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan .. OKTOBER 2018



RUDY SURİYATMIKO



Dasar et Terpercaya
 Berkat ini agar desubukan
 gantinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 • (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **RUDI SURİYATMIKO**
 N P M : **402100015**
 Jurusan : **FISIP - Ilmu Administrasi Publik / konsentrasi Pembangunan**
 Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS Program Usaha: KULIL (menengah Cukm) dalam meningkatkan pelayanan modal usaha Ulem Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi di Kabupaten Aceh Singkil**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	02/7/2018	Bimbingan 1 sharing judul dan latar belakang	A
2	28/7/2018	Bimbingan latar belakang, Rumusan masalah, dan uraian teoretis	A
3	30/7/2018	Bimbingan - Rumusan masalah.	A
4	04/8/2018	Bimbingan Semprom / menyamakan	A
5	17/8/2018	Bimbingan Revisi Esai dan Seminar Proposal	A
6	27/8/2018	Bimbingan untuk daftar pendaan wawancara	A
7	07/9/2018	Bimbingan Revisi Daftar pendaan wawancara	A
8	21/9/2018	Bimbingan hasil wawancara dan pembahasan dan Bab IV juga kesimpulan	A
9	01/10/2018	ACC SKRIPSI SI DANG MEJA HIJAU	A

Medan, 03 Oktober 2018..

Dekan,

ARIFIN SALEH S.Sos.MSP

Ketua Program Studi,

(NAIL KHAIRIAH S.Pd)

Pembimbing ke : 1..

(RIK MOHD YUSRI)

**EFEKTIVITAS PROGRAM USAHA KECIL MENENGAH (UKM)
DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN MODAL USAHA UKM DI
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI DI
KABUPATEN SINGKIL**

RUDI SURIYATMIKO

NPM:1403100015

ABSTRAK

Tujuan program Usaha kecil menengah (UKM) adalah memberikah pelayanan modal usaha pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah. Adapun yang menjadi sasaran masyarakat yang ingin membuka usaha.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menengatahui bagaimana efektivitas program usaha kecil menengah (UKM) dalam meningkatkan pelayanan modal usaha (UKM) di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Analisis data keseluruhan dilakukan dengan mendeskripsikan hasil wawancara kemudian dibahas dan ditarik kesimpulannya.

Dari penelitian diperoleh hasil bahwa pelayanan yang diberikan pihak Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Singkil belum maksimal, dapatt dilihat tujuan dari efektifitas program usaha kecil menengah (UKM) mengenai pelayanan modal usaha dengan mudah, cepat dan tanpa biaya belum dapat terealisasi sepenuhnya. Meneganai sasaran program usaha kecil menengah (UKM) yang sedang dilaksanakan di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Singkil sudah sesuai dengan tahapan yang ditetapkan berdasarkan petunjuk yang merupakan dasar pelaksanaan pekerjaan itu. Jika dilihat dari mekanismenya sama seperti peminjaman modal usaha dengan proses seperti biasa, harus melalui tahapan, prosedurnya. Namun mengenai ketepatan waktu, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Singkil belum dapat melakukan pelayanan yang maksimal.

Kata kunci ; program UKM, pelayanan, modal usaha

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kabar kepada manusia bahwa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan di dunia dan di akhirat.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata-1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Ilmu Administrasi Negara:Administrasi Pembangunan).

Dalam penelitian skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyusunan data guna menyelesaikan skripsi ini, serta penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam skripsi ini belum sempurna. Adapun judul skripsi ini adalah **“EFEKTIVITAS PROGRAM USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN MODAL USAHA UKM DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI (DISPERINDAGKOP) KABUPATEN ACEH SINGKIL.”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian dari penelitian ini masih belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis sangat senang menerima saran dan kritikan demi

kesempurnaan skripsi ini. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT.
2. Yang paling teristimewa Kedua Orangtua, Almh Mamak fahraini yang sudah mendukung dan memberi motivasi kepada penulis selama perkuliahan dan buat Ayah tersayang Riwayatno dan Ibu Tersayang Nurpida dan berserta keluarga besar yang telah memberikan banyak dukungan, Doa, dukungan moril maupun materil dan semangat dari awal kuliah sampai akhir kepada penulis.
3. Bapak Drs. Agussani, M,AP. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr,Arifin saleh s.sos.Msp selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip., M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yaitu, Dr, Mohd.Yusri, M.Si. yang telah memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Dosen dan seluruh Staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan..

8. Para narasumber yang disertakan di dalam penelitian ini.
9. Untuk Abang dan Adik kandung penulis, fahrie iswanto dan rini suriyatni , nuri suriyatni yang selalu memberikan dukungan, doa dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi ini.
10. Untuk Sahabat tersayang penulis yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan Teman Hidup Riska amellia yang setia selalu jalan bareng hobinya makan-makan dan selalu mendukung, memberi support penulis cepat-cepat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa/i stambuk 2014 yang tergabung dalam jurusan Ilmu Administrasi Negara.
12. Alm.Bapak Drs. Tasrif Syam, M.Si selakumantandekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya. Amin.

Medan ... Oktober 2018

Penulis
Rudi Suriyatmiko

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR BAGAN DAN TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II URAIAN TEORITIS	6
A.konsep Usaha kecil menengah (UKM)	6
1. Pengertian Usaha kecil menengah (UKM)	6
2.Ciri- ciri dan contoh dari UKM	7
3.Koperasi Usaha kecil menengah.....	9
B. Konsep Pelayanan	12
1. Pengertian Pelayanan	12
2. Pengertian Pelayanan Publik	13
3. Jenis-Jenis Pelayanan Publik	16
4. Azas, Prinsip, dan Standar Pelayanan Publik	18
C. Konsep Modal Usaha	21
a. Pengertian Modal Usaha.....	21
b.Macam –Macam Modal Usaha	22
1 Modal sendiri	22
2. Modal Asing (Pinjaman).....	23
3. Modal Patungan	25
c.Faktor yang mempengaruhi modal usaha.	25
D. Konsep Kewirausahaan	27
1. Pengertian Kewirausahaan.....	27
2. Ciri-Ciri Wirausahawan.....	29
3. Aspek-Aspek Kewirausahaan.....	29
4. Faktor Yang Mempengaruhi Kewirausahaan	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Defenisi Konsep	34
C. Kerangka Konsep	35
D. Kategorisasi.....	37
E. Narasumber.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	39

H. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	39
1. Gambaran Umum Kecamatan singkil	40
a. Deskripsi Kecamatan Singkil.....	40
b. Letak Geografis	40
c. Visi dan Misi	43
d. Tugas Pokok dan Fungsi	46
e. Struktur Organisasi	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Penyajian Data	50
B. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Kerangka Konsep

Bagan 3.2 Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Stabat

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Daftar Pertanyaan Wawancara dan Hasil Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
- Lampiran V : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : Surat Izin Penelitian Mahasiswa dari kampus Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara
- Lampiran IX : Surat Keterangan telah menyelesaikan Penelitian di Kantor
Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kecamatan
Aceh Singkil
- Lampiran X : SK-6 Permohonan Ujian Skripsi
- Lampiran XI : SK-7 Surat Pernyataan
- Lampiran XII : SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Dalam pembangunan perekonomian di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, karena berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam perindustrian dan hasil-hasil pembangunan. Sehingga UKM merupakan salah satu pilar utama dalam mengembangkan sistem perekonomian. Namun perkembangannya hingga kini masih tertinggal jika dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya. Sementara tipe usaha kecil ini terbukti benar-benar kuat serta sangat banting.

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perkembangan suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan Negara Indonesia. Usaha Kecil Menengah memiliki peranan yang sangat penting dalam lajunya usaha masyarakat. Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam no.99 tahun 1998, mengenai usaha kecil meusaha kecil menengah yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi.

Keberadaan Usaha Kecil Menengah saat ini tidak terlepas dari peranan Pemerintah kabupaten singkil yang dalam hal ini Dinas perindustrian perdagangan dan Koperasi, Proses pelaksanaan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di kabupaten singkil nampaknya terhambat disebabkan karena kurangnya fasilitas – fasilitas , kurangnya jiwa kewirausahaan serta keterbatasan sumberdaya manusia. Mengingat Usaha Kecil dan Menengah diakui menjadi lapangan kerja bagi sebagian pekerja, pelaksanaan program pengembangan Usaha Kecil dan Menengah secara umum selama ini tidak banyak memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan pelayanan modal Usaha Kecil dan Menengah.

Hal ini di picu karena Usaha Kecil dan Menengah secara umum masih menghadapi kendala internal. Beberapa kendala internal kinerja dan pelayanan Usaha Kecil dan Menengah disebabkan dari sumberdaya manusia Dinas perindustrian perdagangan dan Koperasi kabupaten singkil masih terbatas, antara lain: rendahnya sistem, fasilitas ,pelayanan modal, rendahnya pelayanan dari pembimbing UKM, serta manajerial skill, termasuk kurangnya jiwa kewirausahaan. Sehingga dengan perkembangan ekonomi secara lebih luas mengakibatkan tingkat daya saing kita tertinggal

Ada banyak kendala-kendala yang ada dalam program UKM yang harus ditindak lanjuti dan diperbaiki seperti, jarang nya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan akses pengetahuan tentang permodalan UKM dan dari segi transportasi kurang memadai, dan dampak yang timbulkan dari masalah ini pelayanan modal usaha akan memakan waktu dan biaya,

Dalam pelayanan untuk pendamping UKM banyak ditemukan masalah masalah dalam pelayanan untuk pelatihan UKM , masalah yang ditemukan seperti buruknya pelayanan staf pendamping UKM dalam melayani pelaku usaha yang sedang dalam pelatihan UKM

Dari penjelasan diatas, dengan demikian penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian yang berjudul **“EFEKTIVITAS PROGRAM USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN MODAL USAHA UKM DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI (DISPERINDAGKOP) KABUPATEN ACEH SINGKIL.”**

B. Perumusan Masalah

Pada dasarnya masalah merupakan antara harapan dan perkembangan. Oleh karena itu, perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dilakukan sehingga dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian, serta meletakkan masalah pokok yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: **“Bagaimana Efektivitas Program Usaha Kecil Menengah (Ukm) Dalam Meningkatkan Pelayanan Modal Usaha Ukm Di Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Aceh Singkil?**

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan, dan setiap penelitian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa ada arah dan tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapatkan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Efektivitas Program Usaha Kecil Menengah (Ukm) Dalam Meningkatkan Pelayanan Modal Usaha Ukm Di Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Aceh Singkil.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

- a) Penelitian dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecagan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian
- b) Hasil penelitian ini dapat diharapkan untuk menambah wawasan bagi peneliti tentang efektivitas program UKM dalam pelayanan modal usaha .
- c) Untuk membangun ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu administrasi negara serta sebagai bahan banding calon penelitian selanjutnya.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Konsep Usaha Kecil Menengah (UKM)

1. Pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM)

Menurut keputusan presiden RI no.99 tahun 1998, pengertian usaha kecil meusaha kecil menengah : Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mavoritas merupakan kegiatan dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Menurut UU No 20 Tahun 2008, Pengertian Usaha KecilMenengah:

Undang undang tersebut membagi kedalam dua pengertian yakni:

- a) Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 1. Kekayaan bersih lebih sampai dengan paling banyak tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih sampai dengan paling banyak.
- b) Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitasusaha yang memiliki kriteria sebagai berikut :
 1. Kekayaan bersih lebih dari sampai dengan paling banyak tidak termasuk tanah dan bangunantempat usaha.
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih sampai dengan paling banyak.

2. Ciri-ciri dan contoh dari UKM

a. Ciri-ciri usaha kecil

1. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah;
3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;
4. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
5. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha;
6. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
7. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.

b. Contoh Usaha Kecil

1. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
2. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
3. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayudan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
4. Peternakan ayam, itik dan perikanan;
5. Koperasi berskala kecil.

c. Ciri-ciri usaha menengah

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
5. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

d. Contoh usaha menengah

Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:

1. Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
2. Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor;
3. Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi;
4. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
5. Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.

3. Koperasi Usaha Kecil Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. UKM (usaha kecil menengah) merupakan salah satu usaha pendorong terdepan dan pembangunan ekonomi. Gerak sector UKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan.

UKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sector usaha lainnya, dan mereka juga cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan.

Bahwa pada dasarnya UKM memiliki hambatan yang bersifat klasik, yakni hambatan yang berkaitan dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM), lemahnya manajemen usaha, rendahnya akses terhadap sumber pembiayaan dan pasar, serta rendahnya informasi dan teknologi yang dimilikinya. UKM yang memiliki hambatan dan kendala usaha berkaitan dengan ekspor diklasifikasikan menjadi dua, yakni internal dan eksternal.

Hambatan internal adalah hambatan yang disebabkan kekurangan atau kelemahan yang melekat pada UKM itu sendiri. Hambatan eksternal adalah hambatan yang disebabkan adanya faktor luar yang tidak melekat pada UKM.

Beberapa aspek yang menjadi hambatan internal bagi UKM dalam kegiatan ekspor adalah :

- a. Masih rendahnya komitmen UKM dalam memenuhi pesanan pelanggan, baik lokal maupun mancanegara (*on time delivery*);
- b. Masih minimnya sistem manajemen yang diterapkan UKM, khususnya dalam aspek produksi, administrasi, dan keuangan;
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki UKM dalam rangka memenuhi pesanan;
- d. Rendahnya kualitas SDM, sehingga dalam mengelola usahanya tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang sangat rasional;
- e. Terbatasnya alat-alat usaha yang dimiliki UKM, khususnya peralatan usaha kerja;
- f. Lemahnya pelayanan pelatihan usaha kecil menengah oleh pihak-pihak terkait, seperti dalam melayani saat pelatihan banyak pelaku usaha tidak mendapat bimbingan yang efektif dan baik
- g. Rendahnya kemampuan UKM dalam riset dan pengembangan, sehingga belum memenuhi keinginan para *buyer*.

Di sisi lain, terdapat beberapa aspek yang menjadi hambatan eksternal bagi UKM dalam kegiatan ekspor, yakni :

- a. Tidak stabilnya pasokan dan harga bahan baku serta bahan pendukung lainnya;
- b. Persyaratan dari *buyer* semakin tinggi, antara lain berkaitan dengan kualitas produk, kualitas lingkungan sosial, kualitas lingkungan kerja, harga yang bersaing, aspek ramah lingkungan;

- c. Masih adanya regulasi pemerintah yang kurang kondusif sehingga dapat menghambat laju ekspor UKM;
- d. Rendahnya akses UKM terhadap pasar, antara lain meliputi permintaan produk, standar kualitas produk, ketepatan waktu pengiriman, dan persaingan harga;
- e. Rendahnya akses UKM terhadap sumber pembiayaan, antara lain meliputi informasi skim kredit dan tingginya tingkat bunga;
- f. Masih munculnya biaya-biaya siluman yang berkaitan dengan transportasi, kepabeanan, dan keamanan;
- g. Kesulitan memenuhi prosedur dan jangka waktu yang relatif lama untuk mematenkan produk bagi UKM.

Permasalahan yang dihadapi UKM memang sangat kompleks, sehingga dibutuhkan berbagai pendekatan yang dapat mengurangi hambatan yang ada. Keputusan politik pemerintah di semua lini dan tingkatan yang berusaha memberdayakan UKM sudah tepat, mengingat potensi dan peran UKM terhadap pembangunan nasional. Hal yang penting dan mendasar adalah memberikan peluang yang lebih besar kepada para UKM dengan menekan atau mereduksi hambatan-hambatan yang muncul.

Pendekatan yang perlu dilakukan dalam mengurangi hambatan UKM dalam kegiatan ekspor, dapat ditempuh melalui upaya meningkatkan kemampuan finansial dan manajerial UKM, membangun jaringan pemasaran produk ekspor UKM, dan meningkatkan promosi produk ekspor UKM. Kebijakan/peraturan pemerintah yang kondusif dan keberpihakan yang signifikan dunia usaha, merupakan kunci keberhasilan dalam mereduksi hambatan UKM dalam kegiatan

ekspor. Di samping itu, diperlukan pemetaan *demand* dan *supply* pada negara-negara tujuan ekspor. Hal ini akan sangat membantu UKM dalam menentukan jenis dan tujuan pasar produk ekspornya

B. Konsep Pelayanan

1) Pengertian pelayanan

Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Peranannya akan lebih besar dan bersifat menentukan manakala kegiatan-kegiatan jasa di masyarakat itu terdapat kompetisi dalam usaha merebut pasar dan langganan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, karya WJS Poerwadarminta, pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain, seperti tamu atau pembeli.

Menurut Prasajo (2006) pelayanan merupakan respon terhadap kebutuhan manajerial yang akan terpenuhi kalau pengguna jasa itu mendapatkan produk yang mereka inginkan.

Menurut Moenir (2000), pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.

2) Pengertian Pelayanan Publik

pengertian pelayanan publik menurut Sinambela (2006) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang

memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Moenir (2000) menyatakan bahwa “pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu”.

Menurut UUD Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan. Maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pula dalam pelayanan publik Mustopadidjaja (2003) yang dikutip dalam (A. Batinggi & Badu Ahmad, 2013) menyatakan peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjaga kepuasan konsumen. Untuk mewujudkan pelayanan yang mampu memuaskan masyarakat pelanggan, hal-hal berikut harus diperhatikan:

a. visi dan misi pelayanan

visi pelayanan merupakan komitmen dari seluruh manajemen terhadap kualitas pelayanan yang akan disediakan. Visi sifatnya sangat umum dan memiliki jangkauan jauh ke depan. Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi yang sifatnya lebih operasional. Baik visi maupun misi disusun atas dasar perkembangan kebutuhan masyarakat pelanggan maupun perubahan lingkungannya.

b. tujuan dan sasaran pelayanan

meskipun misi sifatnya lebih operasional dibandingkan visi, tetapi dalam mewujudkan diperlukan tahapan pencapaiannya melalui rencana tindak. Oleh karena itu, dalam jangka menengah misi dijabarkan kedalam tujuan. Selanjutnya, tujuan dijabarkan kedalam sasaran-sasaran yang terukur dan siap dioperasionalkan pencapaiannya. Dalam menentukan tahapan pencapaian tersebut, selain dengan melihat kemampuan internal maka masyarakat pelanggan selalu menjadi pertimbangan utama.

Dalam kaitan itu, penetapan tujuan dan sasaran dapat dilihat dari perspektif internal maupun eksternal. Dari perspektif itu tujuan dan sasaran diarahkan untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam memberikan pelayanan yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat pelanggan.

Sedangkan dari perspektif eksternal, tujuan dan sasaran diarahkan untuk menciptakan kepuasan masyarakat pelanggan.

c. standar pelayanan dan ukuran keberhasilan pelayanan

standar-standar diperlukan dalam kaitan komitmen unit pelayanan terhadap pelanggan. Standar-standar diperlukan dalam kaitan komitmen unit pelayanan terhadap pelanggan. Standar-standar tidak hanya meliputi standar produk pelayanan tetapi juga standar operasi yang memungkinkan setiap petugas pelayanan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk yang jelas dan baku. Standar-standar secara internal dapat ditentukan sesuai dengan kemampuan unit pelayanan dengan memadukan harapan pelanggan.

Penetapan standar-standar pada dasarnya dapat memberikan informasi tentang ukuran-ukuran keberhasilan pelayanan sekaligus menunjukkan sejauh mana kapasitas organisasi pelayanan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Bahkan untuk keperluan pelayanan yang mendunia (worldwide).

Standar-standar yang berlaku secara internasional. Standar-standar ditetapkan sebagai salah satu cara untuk memenuhi harapan masyarakat, bahkan melebihi harapan masyarakat, maka pelayanan dimaksud dapat dikatakan prima (excellent).

Standar-standar pelayanan perlu ditetapkan dengan tujuan:

- a. menjadi alat monitoring dan analisis terhadap kinerja pelayanan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- b. menjadi alat komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan penyedia layanan. memberikan fokus dan jelas.

- c. memberikan informasi mengenai akuntabilitas pelayanan yang harus dipertanggungjawabkan oleh unit penyedia layanan.
- d. menjadi lata bagi pengambilan keputusan.

3) Jenis-jenis pelayanan publik

kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negaranya atau memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban dalam konstitusi suatu negara. Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pelayanan, yaitu:

- a. pelayanan pemerintahan, adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan KTP, SIM, Pajak, dan Keimigrasian.
- b. pelayanan pembangunan, suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga negara. Pelayanan ini meliputi penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan dan lainnya.
- c. pelayanan sandang, pangan, dan papan, merupakan jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil, dan perumahan.
- d. pelayanan kemasyarakatan, yaitu jenis pelayanan masyarakat yang dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-

kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, kenegaraan, penjara, rumah yatim piatu, dan lainnya.

Sedangkan kepmen PAN nomor 58 Tahun 2002 mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokkan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu:

- (1) Pelayanan Administratif, Adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keeluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya jenis pelayanan keterangan ahli waris, pelayanan IMB, pelayanan administrasi kependudukan (KTP, NTCR, akte kelahiran, dan akte kecamatan);
- (2) Pelayanan Barang, Pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengelolaan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau individu) dalam sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang memeberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunaannya. Misalnya jenis pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayanan telpon;
- (3) pelayanan jasa, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya.

Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu, misalnya pelayanan angkutan darat, laut, dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan pemadam kebakaran.

4) Azas, prinsip, dan standar pelayanan publik

Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai berikut:

- a. Transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tahap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif, mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak, tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, pemberian dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam proses kegiatan pelayanan diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan, adapun prinsip pelayanan publik menurut keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 antara lain adalah :

- (a) kesederhanaan;
- (b) kejelasan;
- (c) kepastian waktu;
- (d) akurasi,
- (e) keamanan;
- (f) tanggung jawab;
- (g) kelengkapan sarana dan prasarana,
- (h) kemudahan akses;
- (i) kedisiplinan, kesepakatan dan keramahan;
- (i) kenyamanan.

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruangan tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parker, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

Menurut keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 meliputi:

- a. prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
- b. waktu penyelesaian, waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- c. biaya pelayanan, biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
- d. produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- e. sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- f. kompetisi petugas pemberi pelayanan, kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Azas, prinsip dan standar pelayanan tersebut diatas merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah dan juga berfungsi sebagai indikator dalam penilaian serta evaluasi kinerja bagi penyelenggara pelayanan publik. Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan publik ini diharapkan masyarakat biasa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan prosesnya memuaskan dan tidak menyulitkan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa terselenggaranya pelayanan publik dipengaruhi oleh beberapa aspek dan prinsip-prinsip yang penting untuk dilaksanakan guna mewujudkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Konsep Modal Usaha

a. Pengertian Modal

Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Listyawan Ardi Nugraha (2011) “modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”.

Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis.

Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Yang menjadi persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar (Amirullah, 2005).

Menurut Bambang Riyanto (1997) pengertian modal usaha sebagai ikhtisar neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal konkrit dan modal

abstrak. Modal konkrit dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan modal abstrak dimaksudkan sebagai modal pasif.

b. Macam-macam Modal

1. Modal Sendiri

Menurut Mardiyatmo (2008) mengatakan bahwa modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan lain sebagainya. Kelebihan modal sendiri adalah:

- a. Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban perusahaan.
- b. Tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal;
- c. Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama;
- d. Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain.

Kekurangan modal sendiri adalah:

- a. Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas;
- b. Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya ;

- c. Kurang motivasi pemilik, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.

2. Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak.

Di samping itu, dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh.

Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari:

- a) Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta maupun pemerintah atau perbankan asing;
- b) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, modal ventura, asuransi leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya;
- c) Pinjaman dari perusahaan non keuangan.

Kelebihan modal pinjaman adalah:

- a) Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. Selama dana yang diajukan perusahaan layak, perolehan dana tidak terlalu sulit. Banyak pihak berusaha menawarkan dananya ke perusahaan yang dinilai memiliki prospek cerah;

- b) Motivasi usaha tinggi. Hal ini merupakan kebalikan dari menggunakan modal sendiri. Jika menggunakan modal asing, motivasi pemilik untuk memajukan usaha tinggi, ini disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, perusahaan juga berusaha menjaga image dan kepercayaan perusahaan yang memberi pinjaman agar tidak tercemar.

Kekurangan modal pinjaman adalah:

- a) Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga lain sudah pasti disertai berbagai kewajiban untuk membayar jasa seperti: bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, materai dan asuransi;
- b) Harus dikembalikan. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang sedang mengalami likuiditas merupakan beban yang harus ditanggung;
- c) Beban moral. Perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak terhadap pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar (Kasmir, 2007:91).

3. Modal Patungan

Selain modal sendiri atau pinjaman, juga bisa menggunakan modal usaha dengan cara berbagai kepemilikan usaha dengan orang lain. Caranya dengan menggabungkan antara modal sendiri dengan modal satu orang teman atau beberapa orang (yang berperan sebagai mitra usaha) (Jackie Ambadar,

2010:15). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa modal usaha adalah harta yang dimiliki untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh laba yang optimal sehingga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan pedagang kecil di kabupaten aceh singkil

Modal adalah salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Dengan adanya modal, perusahaan bisa melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas aktivitas bisnis. Meskipun tanpa modal (dalam bentuk uang), perusahaan tetap bisa beroperasi tetapi aktivitasnya sangat terbatas.

Kesimpulan Pengertian Modal adalah segala hal yang bersangkutan dukungan usaha dalam produksi oleh suatu perusahaan. Modal ini bisa berasal dari dalam dan dari luar (internal dan eksternal).

Jenis jenis modal perusahaan ini ada 2 macam yaitu modal berupa pinjaman dan bisa modal sendiri.

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi Modal usaha antara lain.

1. Struktur Aktiva (*Tangibility*)

Kebanyakan perusahaan industri yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal permanen yaitu modal sendiri, sedangkan utang bersifat pelengkap. Perusahaan yang semakin besar aktivitya dan terdiri dari aktiva lancar akan cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan dana dengan utang. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh struktur aktiva terhadap struktur modal suatu perusahaan.

2. Growth Opportunity

Kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Teori agensi menggambarkan hubungan yang negatif antara *growth opportunity* dan *leverage*. Di mana, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung akan melewatkan kesempatan dalam berinvestasi pada kesempatan investasi yang menguntungkan.

3. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih banyak dari pada perusahaan kecil. Oleh karena itu kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil. Ukuran perusahaan sering dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu perusahaan, di mana perusahaan dalam ukuran lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya.

4. Profitabilitas

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tentu memiliki dana internal yang lebih banyak daripada perusahaan dengan profitabilitas rendah. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi akan berinvestasi menggunakan utang yang relatif kecil (Bringham & Houston, 2001). Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan untuk membiayai sebagian besar kebutuhan pendanaan dengan dana yang dihasilkan secara internal. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan.

5. Risiko Bisnis

Risiko Bisnis akan mempersulit perusahaan dalam melaksanakan pendanaan eksternal, sehingga secara teori akan berpengaruh negatif terhadap *leverage* perusahaan.

D. Konsep Kewirausahaan

1. Pengertian Kewirausahaan

Kata wirausaha dalam bahasa Indonesia merupakan gabungan dari kata “wira” yang artinya gagah berani, perkasa dan kata “usaha”, sehingga secara harfiah wirausahawan diartikan sebagai orang yang gagah berani atau perkasa dalam berusaha (Riyanti, 2003).

Wirausaha atau wiraswasta menurut Priyono dan Soerata (2005) berasal dari kata “wira” yang berarti utama, gagah, luhur berani atau pejuang; “swa” berarti sendiri; dan kata ”sta” berarti berdiri. Dari asal katanya “swasta” berarti berdiri di atas kaki sendiri atau berdiri di atas kemampuan sendiri.

Kemudian mereka menyimpulkan bahwa wirausahawan atau wiraswastawan berarti orang yang berjuang dengan gagah, berani, juga luhur dan pantas diteladani dalam bidang usaha, atau dengan kata lain wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kewirausahaan atau kewiraswastaan seperti: keberanian mengambil resiko, keutamaan dan keteladanan dalam menangani usaha dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri.

Menurut Drucker (1985) mengartikan kewirausahaan sebagai semangat, kemampuan, sikap dan perilaku individu dalam menangani usaha (kegiatan) yang

mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Hisrich dan Brush (dalam Winardi, 2003) menyatakan bahwa kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan jalan mengorbankan waktu dan upaya yang diperlukan untuk menanggung resiko finansial, psikologikal serta sosial dan menerima hasil-hasil berupa imbalan moneter dan kepuasan pribadi sebagai dampak dari kegiatan tersebut.

Kao (1997) mendefinisikan kewirausahaan sebagai suatu proses penciptaan sesuatu yang baru (kreasi) dan/atau membuat sesuatu yang berbeda (inovasi), yang tujuannya adalah tercapainya kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat.

Hal senada disampaikan oleh Schumpeter (dalam Winardi, 2003) dengan menyatakan bahwa kewirausahaan merupakan sebuah proses dan para wirausahawan adalah seorang inovator yang memanfaatkan proses tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah semangat, kemampuan dan perilaku individu yang berani menanggung resiko, baik itu resiko finansial, psikologikal, maupun sosial dalam melakukan suatu proses penciptaan sesuatu yang baru (kreasi baru) dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (inovasi) dengan menerima hasil berupa imbalan moneter dan kepuasan pribadi.

2. Ciri-Ciri Wirausahawan

Bygrave (dalam Ifham, 2002) mengemukakan beberapa ciri-ciri seorang wirausahawan, yaitu:

- a. Mimpi (dreams), yakni memiliki visi masa depan dan kemampuan mencapai visi tersebut.
- b. Ketegasan (decisiveness), yakni tidak menanggukhan waktu dan membuat keputusan dengan cepat.
- c. Pelaku (doers), yakni melaksanakan secepat mungkin.
- d. Ketetapan hati (determination), yakni komitmen total, pantang menyerah.
- e. Dedikasi (dedication), yakni berdedikasi total, tidak kenal lelah.
- f. Kesetiaan (devotion), yakni mencintai apa yang dikerjakan.
- g. Terperinci (details), yakni menguasai rincian yang bersifat kritis.
- h. Nasib (destiny), yakni bertanggungjawab atas nasib sendiri yang hendak dicapainya.
- i. Uang (dollars), yakni kaya bukan motivator utama, uang lebih berarti sebagai ukuran sukses.
- j. Distribusi (distributif), yakni mendistribusikan kepemilikan usahanya kepada karyawan kunci yang merupakan faktor penting bagi kesuksesan usahanya.

3. Aspek-Aspek Kewirausahaan

Drucker (1985) menguraikan aspek-aspek kewirausahaan, yaitu:

- a. Kemampuan mengindera peluang usaha, yakni kemampuan melihat dan memanfaatkan peluang untuk mengadakan langkah-langkah perubahan menuju masa depan yang lebih baik.

- b. Percaya diri dan mampu bersikap positif terhadap diri dan lingkungannya, yakni berkeyakinan bahwa usaha yang dikelolanya akan berhasil.
- c. Berperilaku memimpin, yaitu mampu mengarahkan, menggerakkan orang lain, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan usaha.
- d. Memiliki inisiatif untuk menjadi kreatif dan inovatif, yaitu mempunyai prakarsa untuk menciptakan produk/metode baru yang lebih baik mutu atau jumlahnya agar mampu bersaing.
- e. Mampu bekerja keras, yaitu memiliki daya juang yang tinggi, bekerja penuh energi, tekun, tabah, melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tanpa mengenal putus asa.
- f. Berpandangan luas dengan visi ke depan yang baik, yaitu berorientasi pada masa yang akan datang dan dapat memperkirakan hal-hal yang dapat terjadi sehingga langkah yang diambil sudah dapat diperhitungkan.
- g. Berani mengambil resiko, yaitu suka pada tantangan dan berani mengambil resiko walau dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu. Resiko yang dipilih tentunya dengan perhitungan yang matang.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kewirausahaan

Menurut Hidayat (2000) faktor-faktor yang mempengaruhi kewirausahaan, yaitu:

a. Variabel situasional

1. Lama studi. Lama studi didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan studi S1.

2. Status kerja Status kerja adalah tingkat keterlibatan responden pada kegiatankegiatan yang memberikan pendapatan bagi dirinya, baik dalam status sebagai karyawan maupun pemilik modal.
- 3). Status pernikahan Status pernikahan adalah tingkat konsekuensi ekonomis status pernikahan yang sedang dialami oleh responden.

b. Variabel latar belakang

1. Latar belakang orang tua

Latar belakang orang tua adalah tingkat keterlibatan lingkungan keluarga dalam aktivitas kewirausahaan. Pengalaman berusaha dapat diperoleh dari bimbingan sejak kecil yang diberikan oleh orang tua yang berprofesi sebagai wirausahawan (Staw dalam Riyanti, 2003).

2. Usia Pengertian usia adalah usia kronologis dari subjek penelitian.

c. Variabel karakteristik kepribadian

- 1) Dorongan berprestasi Dorongan berprestasi mengacu pada preferensi terhadap tingkat kesulitan, standar pencapaian, dan persistensi dalam proses pencapaian tujuan.
- 2) Kemandirian Kemandirian mengacu pada dua faktor, yaitu kemandirian emosional dan kemandirian ekonomis. Kemandirian emosional adalah tingkat kecenderungan individu untuk memutuskan sendiri hal-hal yang bersifat penting bagi dirinya. Kemandirian ekonomis adalah kemampuan individu untuk mencukupi kebutuhankebutuhan ekonomis dirinya sendiri.

3) Toleransi pada perubahan

Toleransi pada perubahan mengacu kepada tingkat kemampuan untuk menghadapi perubahan-perubahan pada situasi kerja dan situasi hubungan sosial. Individu cenderung untuk mencari atau membutuhkan situasi-situasi baru untuk menjaga vitalitas dirinya. Menganggap perubahan bukan sesuatu yang menakutkan atau mengancam, tetapi sesuatu yang menantang atau sebuah peluang.

4) Sikap terhadap uang

Uang adalah medium pertukaran (medium of exchange). Sikap terhadap uang merupakan penerimaan individu terhadap uang sebagai medium dalam aktivitas-aktivitas pertukaran, seperti transaksi ekonomi, dan transaksi sosial.

d. Citra kewirausahaan

Citra kewirausahaan merupakan konstruksi kognitif tentang kewirausahaan. Konstruksi ini meliputi faktor-faktor: persepsi tentang sikap masyarakat terhadap wirausaha, persepsi tentang potensial payoff dari dunia usaha dan konstruksi realitas kewirausahaan.

e. Conviction and career preference

Conviction dan career preference didefinisikan sebagai persepsi individu tentang kemampuan dirinya untuk berhasil dalam bidang kewirausahaan. Konstruksi ini meliputi persepsi tentang tingkat kesulitan dalam memulai sebuah usaha dan sumber yang potensial yang dimiliki.

f. Lingkungan universitas

Konstruk lingkungan universitas maksudnya manifestasi dari konstruk dukungan sosial terhadap kewirausahaan. Komponen dari dukungan universitas terhadap kewirausahaan meliputi: dukungan informasional, dukungan emosional, dukungan instrumental, dan dukungan evaluatif.

g. Niat menjadi wirausaha

Niat menjadi wirausaha merujuk pada rencana untuk membuka sebuah usaha dalam jangka pendek (1 tahun) dan jangka panjang (5 tahun).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Secara bahasa, kata metodologi berasal dari kata method dan logos yang berarti ilmu penelitian yang tentang metode. Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber.

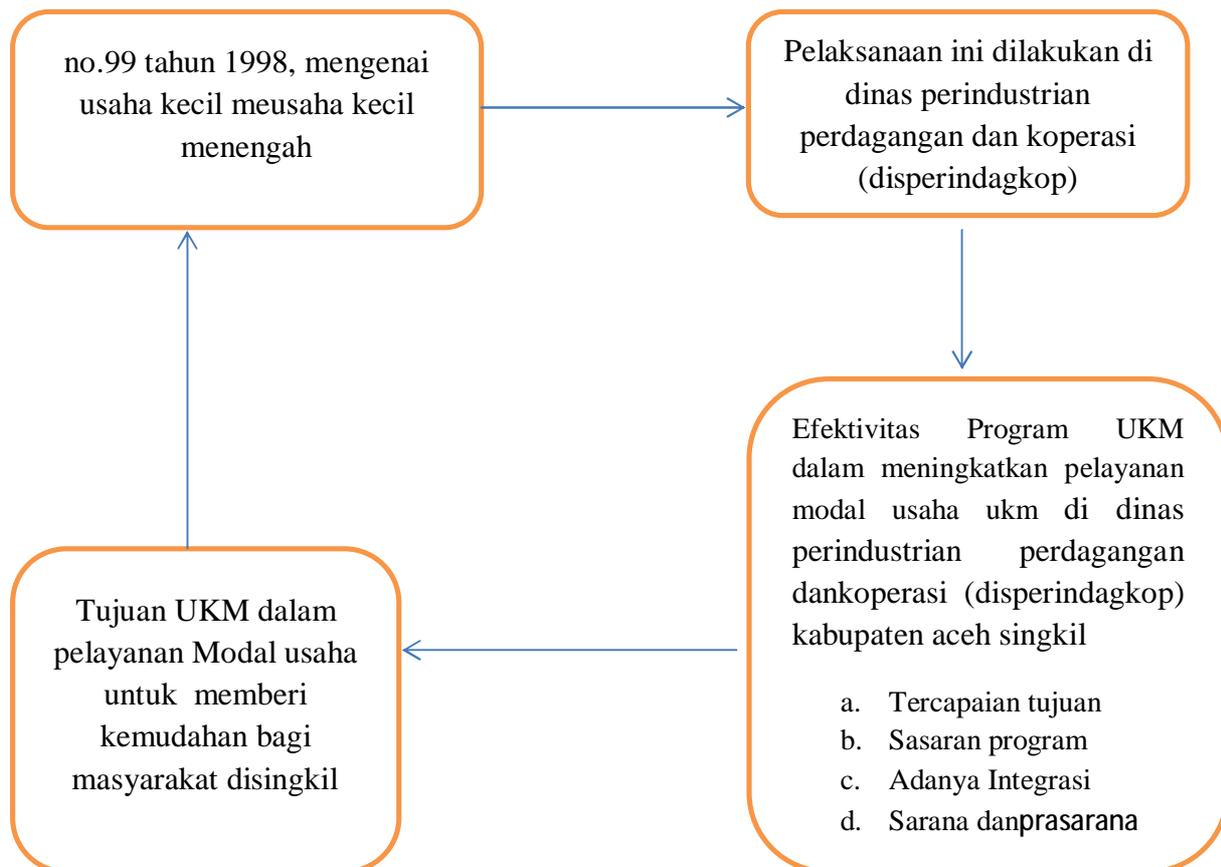
Data deskriptif merupakan sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia sendiri. Menurut Bungin (2012:67) Kualitatif adalah suatu yang menjelaskan fakta yang dalam dan lebih menjelaskan hal-hal fenomena yang sebenarnya.

B. Definisi Konsep

Sugiyono (2010:66) menyebutkan bahwa kerangka berfikir dalam surat penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau

secara mandiri, maka yang dilakukan penelitian disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran yang diteliti.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



Konsep adalah sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan peristiwa, obyek, kondisi, situasi, dan hal-hal yang sejenisnya. Definisi konsep memiliki tujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian

Ada pun yang menjadi konsep dalam penelitian ini dapat di definisikan sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan Pelayanan modal usaha Dalam Pelaksanaan Pelayanan ukm di dinas perindustrian perdagangan dan koperasi dikabupaten singkil adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna memberikan kemudahan bagi pelayanan masyarakat, agar masyarakat dapat menerima pelayanan publik yang lebih dekat baik secara jarak maupun waktu. Sehingga dalam hal ini akan memberikan suatu perbaikan dalam pelaksanaan pelayanan modal usaha.
- b) pelayanan adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang dilayani yang bersifat tidak berwujud dan tidak dimiliki.
- c) pelayanan publik adalah aktifitas yang dirasakan langsung melalui hubungan antara penerima dan penerima yang menggunakan organisasi atau lembaga perusahaan dengan tujuan untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan oleh orang lain.
- d) Usaha Kecil Mengah (UKM) yang memiliki hambatan dan kendala usaha berkaitan dengan ekspor diklasifikasikan menjadi dua, yakni internal dan eksternal.
- e) Moda usaha merupakan hasil produksi yang dipergunakan kembali untuk produksi yang lebih lanjut. Dalam perkembangannya, modal ditekankan kepada nilai, daya beli atau kekuasaan menggunakan yang ada di dalam barang barang modal.

- f) wirausahawan adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kewirausahaan atau kewiraswastaan seperti: keberanian mengambil resiko, keutamaan dan keteladanan dalam menangani usaha dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu :

- a) Tercapainya tujuan, dengan maksud untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat dengan proses yang mudah, cepat dan murah.
- b) Sasaran Program, yang menjadi sasaran Penyelenggaraan program UKM adalah membantu atau memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah.
- c) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi serta komunikasi kepada masyarakat agar program UKM yang dijalankan dapat berjalan dengan baik.
- d) Sarana dan prasarana kerja untuk meningkatkan dan mempermudah pelayanan modal usaha baik untuk pegawai maupun masyarakat.

E. Narasumber/ Informen

Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana pelayanan modal usaha ukm di dinas perindustrian perdagangan dan koperasi dikabupaten singkil.

F. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

- 1) Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab serta langsung kepada pihak-pihak yang terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder yaitu data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:
 - a) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumentasi yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber yang relavan dengan obyek penelitian
 - b) Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literature serti: buku, karya ilmiah dan laporan penelitian.

G. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penggumpulan data, kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara diuraikan secara deskriptif dan analisis kualitatif.

H. Lokasi penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari data menggumpulkan data yang berguna dan bermanfaat dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi tempat penelitian ini adalah dinas perindustrian perdagangan dan koperasi dikabupaten Singkil.

1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Singkil

a. Deskripsi Kabupaten Aceh Singkil

Aceh Singkil adalah sebuah kabupaten yang berada di ujung barat daya Provinsi Aceh-Indonesia. Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian besar wilayahnya berada di kawasan berawa-rawa dan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

Kabupaten ini secara fisik terdiri dari dua wilayah, yakni wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari kabupaten Aceh Singkil adalah Kecamatan Kepulauan Banyak yang terletak di pantai barat kabupaten ini. Ibu kota kabupaten Aceh Singkil terletak di kecamatan Singkil dan aktifitas keseharian Pemda kabupaten dipusatkan di kawasan Pulau Sarok, Singkil. Singkil berada di jalur barat pantai pulau Sumatera yang menghubungkan

Banda Aceh-Meulaboh-Tapak Tuan-Medan dan dari Medan dapat dicapai dengan transportasi darat menuju ke arah barat selatan Sumatera Utara, Sibolga.

b. Letak Geografis

Kabupaten Aceh Singkil terletak di Pesisir Pantai Barat Sumatera dengan luas wilayah 2.187 Km² terletak di 2° 02' - 2° 27' 30" Lintang Utara / 97° 04' - 97° 45' 00" Bujur timur yang berbatasan langsung dengan Kota Subulussalam disebelah Utara, Samudera Indonesia disebelah Selatan, Provinsi Sumatera Utara disebelah Timur dan Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan disebelah Barat.

Kabupaten Aceh Singkil terbagi dalam 10 Kecamatan, 15 Mukim dan 117 Desa / Kelurahan dan memiliki jumlah penduduk sebesar 102.804 jiwa pada tahun 2008 menurut data Badan Pusat Statistik kabupaten Aceh Singkil. Dan dari jumlah penduduk tersebut terjadi persebaran di setiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Nama kecamatan	Jumlah penduduk	Persentase Penyebaran Penduduk kecamatan
1. Pulau Banyak	6.469	6,32%
2. Singkil	16.868	16.41%
3. Singkil Utara	8.624	8.39%

4. Kuala Baru	2.404	2.34%
5. Simpang kanan	13.775	13.40%
6. Gunung Meriah	31.055	30.21%
7. Danau Paris	5.599	5.45%
8. Suro Makmur	7.734	7.52%
9. Singkohor	5.026	4.89%
10 Kota Baharu	5.223	5.08%

Dari table diatas dapat dilihat bahwa persebaran penduduk paling banyak berada di Kecamatan Gunung Meriah yang memiliki jumlah penduduk sebesar 31.775 jiwa. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Gunung Meriah secara umum dapat dikatakan sebagai sentra bisnis di kawasan Kabupaten Aceh Singkil. Dan pusat pemerintahan kabupaten Aceh Singkil berada di Kota Singkil yang juga merupakan Ibukota dari Kabupaten Aceh singkil.

Dipilihnya Singkil sebagai Ibukota dianggap tepat oleh sebagian kalangan namun hal tersebut tidaklah terlalu efektif. Mengingat jarak tempuh bagi kecamatan lain yang ada di kawasan aceh singkil tersebut untuk mengurus adm. Lihatlah bagaimana jauhnya jarak antara Subulussalam dengan kantor untuk layanan

umum. Bagi masyarakat subulussalam atau gelombang harus berpikir 2 kali untuk pergi ke singkil kerna bisa memakan yang lama. Pada akhir Subulussalam melepaskan dari kabupaten ini dengan menjadikan Subulussalam menjadi Pemkot. Sehingga wilayah Aceh singkil sebelumnya begitu luas menjadi lebih kecil.

Kondisi geografis ini membuat Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai letak strategis di Provinsi Aceh. Hal ini dibuktikan dengan telah dibukanya jalur perhubungan laut antara Singkil–Gunung Sitoli Kotamadya Nias dan rencana pembangunan jalan darat antara Kecamatan Kuala Baru Kabupaten Aceh singkil dengan Kecamatan Trumon yang berada di Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu Kabupaten Aceh Singkil juga telah membangun dan mengoperasikan Bandar Udara Syeh Hamzah Fansuri sebagai sarana perhubungan udara yang membuka jalur penerbangan antara Singkil–Medan dan Singkil Banda Aceh ataupun sebaliknya.

c. Visi Dan Misi

1. Visi kecamatan aceh singkil

Dinas perindustrian perdagangan koperasi dan ukm kabupaten aceh singkil" terwujudnya sektor perindustrian perdagangan koperasi dan umk yang berkualitas, mandiri, tangguh dan berdaya saing"

2. Misi kecamatan aceh singkil

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Ukm Kabupaten Aceh singkil

1. Meningkatkan Pelayanan Aparatur terhadap Masyarakat

2. Meningkatkan Koperasi, UMK yang berkualitas dan mandiri sebagai pelaku ekonomi rakyat
3. Meningkatkan Usaha Perdagangan yang berdaya saing
4. Mewujudkan Industri Kecil Menengah yang tangguh dalam Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Singkil

Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi

Susunan dan Kedudukan

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Perindustrian;
4. Bidang Perdagangan;
5. Bidang Pengelolaan Pasar;
6. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
7. Bidang Pertambangan dan Energi;
8. UPTD; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Data dan Penyusunan Program; dan

3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Perindustrian, terdiri dari :

1. Seksi Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah;
2. Seksi Usaha dan Iklim Usaha; dan
3. Seksi Pendaftaran Usaha Perindustrian.

(4) Bidang Perdagangan, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Usaha dan Tertib Niaga;
2. Seksi Pendaftaran Usaha Perdagangan; dan
3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.

(5) Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :

1. Seksi Penataan Pasar;
2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana; dan
3. Seksi Pengelolaan Jasa Usaha.

(6) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

1. Seksi Bina Lembaga Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. Seksi Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
3. Seksi Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

(7) Bidang Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

1. Seksi Sumber Daya Mineral dan Batu Bara; dan
2. Seksi Pertambangan Umum dan Energi;

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;

(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

(3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Tuas, pokok dan fungsi

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang perindustrian, pertambangan dan energi sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 55, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai fungsi :

1. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
2. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
4. penyelenggara tugas-tugas perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi serta pelaksanaan pengawasan teknis yang menjadi kewenangan daerah;
5. pelaksanaan pendataan, pengolahan data dan informasi kegiatan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
7. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
8. pembinaan UPTD; dan
9. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 56, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai kewenangan:

1. menyediakan dukungan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
2. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
3. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
4. melaksanakan pembangunan pasar tradisional, percontohan, daerah tertinggal, pasar seni, pasar lelang dan gudang sortasi;
5. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
6. melaksanakan promosi hasil usaha industri dan menyelenggarakan pameran, promosi bagi keperluan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
7. menyediakan dukungan fasilitas pengembangan industri dan perdagangan serta merencanakan kawasan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, pertambangan dan energi;
8. mengupayakan pengadaan dan penyaluran barang dan pengendalian pasar bagi kebutuhan daerah serta perlindungan bagi konsumen dan penyaluran barang dan pendaftaran perusahaan; dan

9. melaksanakan tera dan tera ulang di bidang Kemetrolgian, laboratorium penelitian dengan sertifikasi mutu barang, laboratorium penelitian industri serta peningkatan pengembangan sumber daya manusia potensial di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.

BAB IV

HASIL PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Proses penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan data data yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian dalam objek penelitian. Dalam proses ini peneliti mengumpulkan data berupa jawaban hasil dari wawancara dan juga hasil pengamatan langsung yang dilakukan peneliti pada lokasi penelitian. Dalam bab ini disajikan data data yang di peroleh selama penelitain ysang berlangsung di kantor dinas perindustrian perdagangan dan koperasi aceh singkil kabupaten aceh singkil.

Salah satu penerapan dan bukti nyata yang terjadi dilapangan adalah adanya suatu program yang dikeluarkan pemerintah melalui peraturan menteri dalam negeri no 83 Tahun 2014 tentang pemberian izin usaha mikro dan kecil menengah (UMK) DI bentuk dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai tempat pelayanan pemberian modal usaha , sedangkan tujuan dari program usaha kecil menengah (UKM) berdasarkan permendagri nomor 83 tahun 2014 yaitu salah satunya peningkatan pelayanan pemberian izin usaha dan modal usaha kepada masyarakat atau pelaku usaha

Prinsip Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil adalah Prosedur sederhana, mudah dan cepat, Terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil; dan Kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

1. Deskripsi hasil wawancara

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah adanya tujuan yang hendak tercapai sasaran program , integrasi serta sarana dan prasarana Kategorisasi tersebut penting dalam menyelusuri evektifitas program UKM dalam meningkatkan pelayanan pemberian modal usaha kecamatan singkil kabupaten aceh singkil terselenggaranya efektivitas tersebut dari kategori sasi yang akan dideskripsikan sesuai dengan hasil wawancara dengan para narasumber

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan, hal ini dimaksud supaya karyawan pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat dicapai.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari senin 27 agustus 2018 jam 09:00 dengan bapak H.Subarsono, S,Mn selaku Sekretaris menyatakan bahwa program UKM memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku, prosedurnya itu telah mengikuti aturan yang telah di tetapkan, mengenai persyaratan, biaya, waktu sudah mengikuti pedoman pelayanan administrasi program ukm, untuk setiap menjalankan tupoksinya dan melakukan sosialisasi demi kelancaran program.

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 28 Agustus 2018 Jam 10:07 Wib Di Kantor Disperindakop dengan bapak Fahri Iswanto S.com selaku operator koperasi dan UKM menyatakan bahwa program UKM ini tidak berjalan begitu mulus masih ada kendala kendala juga yang masih di perbaiki, artinya banyak masyarakat belum mengetahui persyaratan dan akses program UKM , dan juga untuk prosedur pelayanan pelatihan untuk pelaku UKM masih banyak kendala terutama dari segi staf pendamping

yang kadang datang terlambat dan membuat waktu termakan banyak, pelaksanaan program UKM ini sebenarnya untuk membantu masyarakat agar tidak sulit dalam menjadi pelaku usaha yang benar , karena sasaran utama dari kegiatan UKM melayani masyarakat agar lebih mudah dan cepat.

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 29 Agustus 2018 Jam 10:25 Wib Di Kantor Disperindakop dengan bapak : Amsardin, Se selaku kabid koperasi menyatakan program UKM ini sudah berjalan dengan baik pemahaman program UKM ini bertujuan untuk masyarakat yang ingin membuat usaha tapi belum mempunyai modal yang cukup, maka dari itu dengan adanya program ini pihak masyarakat dapat meminjam bantuan modal usaha kepada kami dengan syarat yg sudah di tentukan. Dalam prosedurnya juga berjalan lancar masyarakat tidak di sulitkan dalam melengkapi administrasi dan lebih cepat

Berdasarkan hasil wawancara selasa 28 agustus 2018 jam 11 wib dengan jori Amarta selaku masyarakat menyatakan bahwa program UKM ini cukup baik dan sangat membantu masyarakat, untuk prosedur dan pelayanan kita harus membuat suratpermohonan atau proposal baru di serahkan kepada bagian administrasi UKM baru akan diperiksa oleh kepala dinas.dilihat dari pelaksanaannya cukup baik.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 30 agustus 2018 jam 11 wib dari bapak zuperdi wijaya selaku masyarakat program UKM ini sangat membantu masyarakat dengan pelayanan yang diterapkan dalam program UKM.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program UKM di kantor dinas perindustrian perdagangan dan koperasi di aceh simkil kabupaten aceh singkil berjalan mulus adanya kendala – kendala yang menghambat pelaksanaan program UKM sebagian masyarakat yang belum mengetahui adanya program tersebut karena kurangnya

sosialisasi yang dilakukan. Prosedur yang dilakukan sudah berdasarkan standar pelayanan mengenai syarat dan waktu.

b. Sasaran Program

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari senin 27 agustus 2018 jam 09:09 dengan bapak H.Subarsono, S,Mn selaku Sekretaris menyatakan bahwa program UKM yang sedang berjalan dikantor dinas perindustrian perdagangan dan koperasi di aceh singkil kecamatan aceh singkil sudah sesuai, karena proses dan tahapan-tahapan yang dilalui sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan petunjuk teknis yang merupakan dasar pelaksanaan pekerjaan itu.dari kebijakan sudah dijalankan dengan baik kebijakan yang di buat oleh dinas perindustrian perdagangan dan koperasi di aceh singkil seperti administrasi prosedur tidak dipungut biaya. Dari segi bantuan alat-alat usaha kepada sipelaku usaha, dan kebijakan yang dibuat sudah berjalan dengan lancar dan diterima oleh masyarakat yang bersangkutan.

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 28 Agustus 2018 Jam 10:22 Wib Di Kantor Disperindakop dengan bapak Fahri Iswanto S.com selaku operator koperasi dan UKM menyatakan bahwa program UKM sudah sesuai, karena setiap perekrutan peserta pelatihan atau pelaku usaha kecil menengah (UKM) selalu staf terkait dibidang UKM atau pendamping dari UKM turun kelapangan untuk mengidentifikasi peserta atau pelaku usaha kecil menengah terlebih dahulu supaya mengetahui letak titik permasalahan dan di dampingi agar usaha tersebut menjadi lebih baik lagi contoh bantuan yang di serahkan seperti steling jualan kompor dan lain2 jadi dari segi sasaran yang telah dilakukan sudah cukup baik dan sudah teratur.

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 29 Agustus 2018 Jam 10:44 Wib Di Kantor Disperindakop dengan bapak : Amsardin, Se selaku kabid koperasi menyatakan program UKM ini sudah sesuai karena dengan adanya program ini terciptanya lapangan kerja baru yang bermamfaat mengurangi pengangguran dari kebijakan yang sudah dilakukan seperti saluran bantuan terhadap pelaku usaha, seperti kebutuhan usaha dan lainnya dana yang di salurkan kami dapat dari dana hiba dan dari setiap anggota DPRK aceh singkil dan juga mekanisme cukup bagus dan tidak mempersulit masyarakat

Bedasarkan hasil wawancara pada hari selasa 30 agustus 2018 jam 11:09 wib dari bapak zuperdi wijaya selaku masyarakat mengatakan bahwa program UKM ini sudah sesuai dan berfungsi membantu masyarakat dan mekanisme yang dilakukan sudah bagus dan teratur.

Bedasarkan hasil wawancara pada hari selasa 28 agustus 2018 jam 11:45 wib dari bapak Jori Amarta selaku masyarakat mengatakan bahwa program UKM ini sudah sesuai dan kebijakan kebijakannya program itu sendiri memberikan berupa alat-alat bantu untuk keperluan usaha serta mekanismenya sudah berjalan dengan lancar seperti pendataan secara selektif terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program UKM di kantor dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Di Kabupaten Singkil tentu sudah sesuai karena proses dan tahapan tahapan yang dilalui sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan petunjuk teknis yang merupakan dasar pelayanan pekerjaan itu, kebijakan yang dibuat antara lain biaya nol rupiah dalam melengkapi administrasi supaya masyarakat tidak terlalu terbebani dengan persyaratan – persyaratan yang telah ditentukan.

Jika dilihat dari mekanismenya sama seperti dengan proses seperti biasa harus melalui tahapan – tahapan kemudian proses.

c. Integrasi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari senin 27 agustus 2018 jam 09:45 dengan bapak H. Subarsono, S.Mn selaku Sekretaris menyatakan bahwa program UKM sosialisasi yang sudah dilakukan sudah cukup baik, contoh sosialisasi yang sudah diterapkan seperti diadakannya kegiatan pemberian pengetahuan pada masyarakat tentang UKM, manfaat dan fungsi UKM, memberikan pemahaman betapa pentingnya program UKM. Tujuan yang ingin kami capai agar masyarakat sadar akan pentingnya keberadaan program UKM ini. Dengan adanya program ini dapat mempermudah masyarakat dalam memulai usaha, dari segi hambatan pasti ada seperti hambatannya jelas banyak, karena masalah teritorial wilayahnya, bagian perlengkapan administrasi yang kurang dipahami masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 28 Agustus 2018 Jam 10:07 Wib Di Kantor Disperindakop dengan bapak Fahri Iswanto S.com selaku operator koperasi dan UKM menyatakan bahwa program UKM ini sudah melakukan sosialisasi setiap tahunnya contoh sosialisasi yang dilakukan seperti peminjaman modal usaha untuk masyarakat, dan juga pihak dari propinsi juga sering berkunjung untuk melakukan sosialisai terhadap program bantuan modal usaha tersebut, hanya saja pihak dinas dan propinsi dapat melakukan hal tersebut apabila ada persetujuan dari pusat. Dengan adanya program ini dapat mempermudah masyarakat memahami program

tersebut karena UKM sudah menyediakan tempat pelatihan dan akan didampingi oleh staf pendamping UKM kalau dari segi kendala terdapat kendala dalam pengawasan terhadap pelaku usaha.

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 29 Agustus 2018 Jam 10:54 Wib Di Kantor Disperindakop dengan bapak : Amsardin, Se selaku kabid koperasi menyatakan program UKM ini sudah melakukan sosialisasi seperti turun langsung dan berjumpa dengan masyarakat dari segi kemudahan baik dan di damping oleh petugas (pendamping UKM) kalau dari hambatan yang di alami pasti ada, seperti kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti pelatihan di karenakan lokasi di adakanya pelatihan cukup jauh

Bedasarkan hasil wawancara pada hari selasa 28 agustus 2018 jam 11:55 wib dari bapak Jori Amarta selaku masyarakat mengatakan bahwa program UKM dari sosialisasi cukup baik dengan adanya program ini selaku masyarakat mengatakan sangat membantu dalam mempermudah pengolahan usaha hambatan yang di alami hanya dari prosedur dan waktu

Bedasarkan hasil wawancara pada hari selasa 30 agustus 2018 jam 11:55 wib dari bapak zuperdi wijaya selaku masyarakat mengatakan bahwa program UKM ini tanggapan masyarakat sangat antusias Dengan Adanya Program UKM Ini Dapat Mempermudah Masyarakat Dalam Pelayanan Modal Usaha dari pelayanan yang dilakukan pendamping UKM sepertinya kurang baik dan efektif

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat terhadap program UKM itu sendiri dalam segi sosialisasi cukup baik tapi dari pelayanan di lapangan kurang efektif karena terkesan lambat dan memakan waktu

d. Terjadinya sarana dan prasarana kerja

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada hari senin 27 agustus 2018 jam 10:08 dengan bapak h.Subarsono, s,mn selaku Sekretaris menyatakan bahwa program UKM bahwa menunggang kegiatan program UKM memang termasuk salah satunya faktor yang boleh dikatakan menghambat karena minim nya alat2 kantor

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 28 Agustus 2018 Jam 10:34 Wib Di Kantor Disperindakop dengan bapak Fahri Iswanto S.com selaku operator koperasi dan UKM menyatakan bahwa sarana dan prasarana cukup baik , hanya saja ada beberapa dari fasilitas kantor yang mungkin sudah tua dan tidak bisa di gunakan dan dapat menghambat kinerja pegawai

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 29 Agustus 2018 Jam 11:08 Wib Di Kantor Disperindakop dengan bapak : Amsardin, Se selaku kapid koperasi menyatakan sarana dan prasarana cukup baik akan tetapi terkendala dalam dana untuk pembelian fasilitas fasilitas yang baru

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 28 agustus 2018 jam 12:00 wib dari bapak Jori Amarta selaku masyarakat mengatakan bahwa kondisinya cukup baik dan lumayan

Berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 30 agustus 2018 jam 12: 09wib dari bapak zuperdi wijaya selaku masyarakat mengatakan bahwa belum begitu baik dan harus di perbaiki dalam ruangan tunggu dan lain lain.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di kantor Di Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Di Kabupaten Singkil belum cukup baik dan menghambat dalam pekerjaan dan pelayanan untuk masyarakat

2. Analisis data

Dalam analisis data, semua data dikumpulkan melalui data primer, yaitu dapat dilapangan melalui wawancara secara langsung yang dilakukan penulis kepada narasumber, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dilapangan, maka dapat dianalisis satu persatu mengenai jawaban dari narasumber sehingga dapat diperoleh data yang aktual.

a. Tercapainya Tujuan

Usaha kecil menengah (UKM) adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. “Kegiatan rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat, prosen pengelolaanya , mulai dari permohonan atau proposal sampat ke tahap pemberian modal usaha dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan, warga cukup menyerahkan berkas administrasiyang telah di tentukan lalu berkas tersebut akan di klarifikasi oleh ketua program UKM , jika berkas adminitrasi si pemohon sudah lengkap makan akan di daftarkan sebagai pelaku usaha dan akan di berikan modal usaha yang bdia perlukan

UKM diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan daya usaha masyarakat dalam bersaing, meningkatkan kualitas usaha yang dijalankan terutama dari aspek waktu dan biaya, melalui program UKM , lokasi kecamatan aceh singkil penyelenggaraan cukup dekat dan ,udah di jangkau oaleh masyarakat bila dibandingkan dengan ibu kota dan waktu yang diperlukan menjadi lebih sedikit.

Efektivitas program UKM dalam meningkatkan pelayanan modal usaha di kantor dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kecamatan singkil cukup baik

Faktor – factor yang jadi kendala adalah kurang nya minat masyarakat dan pelayanan dalam pendamping UKM untik menujung minta masyarakat dan akses yang kurang informasi yang jelas

b. Sasaran program

Untuk dapat mencapai sasaran kegiatan UKM , dengan adanya hubungan interaksi antara masyarakat dengan staf pendamping UKM dengan menyampaikan informasi kepada kelompok masyarakat langsung secara lisan melalui tatap muka penyampaian infomasi dari media seperti spanduk, brosur dan media seperti internet

Dalam program UKM dikantor dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kecamatan singkil memiliki standar oprasional prosedur, kebijakan yang dibuat antara lain seperti pemberian bantuan modal usaha dan alat-alat usaha yang diperlukan si pelaku usaha.

Namun dalam segi pelayanan dalam pelatihan UKM masih belum dapat melakukan pelayanan yang maksimal

c. Integrasi

Dengan adanya program UKM ini dapat mempermudah masyarakat dalam memulai sebuah usaha dapat dilihat dari antusias pelaku usaha yang sekarang banyak yang mengikuti program UKM ini

Penyelenggaraan pelayanan pemberian modal usaha pertama kali di lakukan di kantor dinas perindustrian perdagangan dan koperasi , masyarakat hanya membuat proposal yang bersifat meminta lalu akan di klarifikasi oleh pegawai dinas disperindakop

Proses dalam pembuatan proposal untuk jaminan modal usaha memiliki beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Judul yang menarik
2. Deskripsi usaha yang jelas
3. Anggaran biaya
4. Penulisan yang baik

Dan juga dalam administrasi , masyarakat harus melengkapi lampiran seperti

1. Menyiapkan KK dan KTP
2. Menyiapkan surat keterangan berperilaku baik dari desa
3. Menyiapkan SKCK dari kepolisian
4. Menyiapkan surat keterangan non narkoba dari rumah sakit

Sesuai ketentuan yang berlaku, berkas tersebut akan di teliti kelengkapannya, selanjutnya akan di serahkan kepada atasan yang berwenang dan akan segera di tidak lanjuti apakah si pelaku usaha sudah melengkapi semua persyaratan yang telah di tentukan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha dari program UKM.

a. Sarana dan prasarana kerja

Program UKM dalam mencapai tujuan juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mendukung pemberian pelayanan yang dilakukan oleh dinas Disperindakop kecamatan aceh singkil

Sarana adalah suatu (media) yang dapat dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, dalam sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pada kantor dinas perindustrian perdagangan dan koperasi terbatas dan sudah tua atau termakan usia , maka untuk untuk menjamin ketepatan waktu dalam menyelesaikan kegiatan UKM , setiap tahapan kegiatan dapat dilaksanakan oleh kinerja pegawai

Dalam melakukan kegiatan tersebut, sarana pendukungnya ialah seperti computer , printer , tranfortasi , dan lain- lain dengan jaminan sarana yang disebut dalam kondisi yang bagus dan dapt digunakan untuk kegiatan UKM.

Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan , dalam UKM , prasarana yang dimaksud dalah teknologi dan informasi pemberian informasi secar lengkap dan cepat kepada masyarakat, bagaiman kita ketahui, ketersediaan prasarana bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan hasil pengelolaan data tentang efektivitas program usaha kecil menengah (UKM) dalam meningkatkan pelayanan modal usaha ukm di dinas perindustrian perdagangan dan koperasi di kabupaten singkil sebagai berikut :

1. Tujuan dari efektivitas program UKM dalam meningkatkan pelayanan modal usaha dengan mudah , cepat dan belum dapat terealisasi sepenuhnya, prosedur pelaksanaan UKM dari penyerahan berkas proposal hingga diterbitkannya sertifikat pelatihan modal usaha, biaya yang dikenakan dalam layanan administrasi dan kelengkapan proposal tidak di kenakan biaya atau gratis kalau biaya dalam melengkapi administrasi biaya akan di tanggung oleh si pelaku usaha itu sendiri
2. Mengenai sasaran program UKM yang sedang dilaksanakan di kantor dinas perindustrian perdagangan dan koperasi di kabupaten aceh singkil tentu sudah sesuai karena proses dan tahapan – tahapan yang dilalui sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan petunjuk tehnik yang merupakan dasar pelaksanaan pekerjaan itu, namun dalam mencapai sasaran yang telah di tentukan banyak terdapat kendala kendala yang menghambat tercapainya sasaran.
3. Tanggapan masyarakat untuk program UKM belum semua mengetahui cara prosedur mendapatkan modal usaha dan pelatihan di program ini akan tetapi sebagian masyarakat memberi tanggapan untuk permodalan program UKM itu sendiri baik ,

karena disamping ketetapan waktu dan biaya tidak terlalu mahal dan modal yang diberikan sangat sesuai dengan permohonan proposal yang di minta di pelaku usaha .

4. Sarana dan prasarana yang tersedia di kantor dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kecamatan aceh singkil dalam menunjang kinerja belum maksimal, penyediaan sarana dan prasarana teknis maupun nonteknis sesuai belum dengan kebutuhan. Banyak fasilitas – fasilitas yang sudah tua dan tidak bisa digunakan dengan maksimal

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah menambahkan fasilitas – fasilitas yang baru agar kinerja dari pegawai di kantor dinas perindustrian perdagangan dan koperasi berjalan efektif dan efisien dan dapat mempercepat dalam pelayanan modal usaha di program UKM
2. Mengoptimalkan pengawasan pendamping UKM agar masyarakat merasa terlayani dan paham dalam menjalankan modal usaha yang dia miliki.
3. Tingkatkan lagi sosialisasi yang di adakan setiap tahun oleh dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kabupaten aceh singkil , peningkatan yang jadi saran adalah seperti sosialisasi ke daerah- daerah terpencil agar masyarakat yang hidup di sana dapat mengetahui pentingnya program usaha menengah ini
4. Hambatan dari sektor masyarakat dalam pemahaman pembuatan proposal dan pelatihan modal usaha, perlunya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk kelancaran kegiatan agar pemberian modal usaha tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, dan Imam Hardjanto, 2005. **Pengantar Bisnis**, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Agung Kurniawan 2005. **Transpormasi Pelayanan Publik**. Yogjakarta: Pembaharuan
- Ardi Nugroho, Listyawan. 2011. **Pengaruh Modal Usaha**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Riyanto, 1997, **Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan**, Edisi 4. BPFE, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2012. **Metode Penelitian Kualitatif**. PT. Rajagrafindo
- Gie, The Liang, 2001. **Administrasi Perkantoran**, Edisi Revisi. Bandung. Mandar Maju
- Mardiyatmo.2008.**Kewirausahaan**. Surakarta: Yudistira.
- Mathis, Robert L, dan John H. Jackson. 2001. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jakarta: PT. Salemba Empat
- Moener. 2002. **Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia**. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Prasojo Eko. 2006. **Kinerja Pelayanan Publik: Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja, Keterlibatan dan Partisipasi dalam Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan**. Jakarta: Yappika
- Siagian, Sondang P.2008. **Manajemen Sumber Daya Manusia**. PT. Bumi Aksara
- Sianipar. 2001. **Manajemen Pelayanan Publik**. Jakarta: LAN
- Sinambela, Lijan P dkk. 2006. **Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implementasi**. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2011. **Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D**. Alfabeta
- Waluyo, 2007. **Manajemen Publik (konsep, aplikasi, Implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)**. Bandung: Mandar Maju

Sumber Lain :

Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Rudi Suriyatmiko
Tempat Tanggal Lahir : Singkil 25 maret 1995
Jenis Kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Umar, no 21
Anak Ke : 3 (tiga) Dari 4 (Empat) Bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Riwayatno
Pekerjaan : PNS
Ibu : Almh.Fahraini
: Nurpida
Pekerjaan : ibu rumah tangga
Alamat :Jln socpindo,desa pulosarok, Aceh Singkil,
kabupaten Aceh Singkil

Riwayat Pendidikan

1. Tamat SD Negeri No 04 Singkil Tahun 2007, Berijazah
2. Tamat SMP Negeri 1 Singkil Tahun 2010, Berijazah

3. Tamat SMA Negeri 1 Singkil Tahun 2013, Berijazah
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Ilmu
Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun
2014 Sampai Sekarang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini diperbuat dengan sebenarnya.

Penulis

Rudi Suriyatmiko